

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan OPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;

- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan

dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 048 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	3.1	LRA
		3.1.1 Pendapatan_LRA
		3.1.2 Belanja
	3.2	LO
		3.2.1 Pendapatan -LO

		3.2.2	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		3.3.1	Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca	
		3.4.1	Aset
		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab V	Penutup		

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

a. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Pajak				
2	Pajak				
3	Retribusi				
4	Retribusidll				

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp 0,00 dari target yang ditetapkan Rp 0,00 atau 0,00 %.

2. Realisasi pendapatan lebih/(kurang) dari anggaran disebabkan

*(jelaskan alasan jika realisasi kurang dari target/anggaran, untuk keperluan menjawab pertanyaan **Evaluasi Gubernur**)*

b. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Belanja Pegawai	3.727.692.000	3.634.474.743	93.217.257	97,50
2	Belanja Barang dan Jasa	7.410.849.000	6.601.997.114	808.851.886	89,09
3	Belanja Modal	1.130.381.000	1.088.562.022	41.818.978	96,30
	Jumlah	12.268.922.000	11.325.033.879	943.888.121	92,31

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 3.634.474.743,- dari target yang ditetapkan Rp 3.727.692.000,- atau 97,50%.
2. Realisasi Belanja Brg Jasa sebesar Rp 6.601.997.114,- dari target yang ditetapkan Rp 7.410.849.000,- atau 89,09%.
3. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.088.562.022,- dari target yang ditetapkan Rp 1.130.381.000,- atau 96,30%.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 92,31% dari yang dianggarkan dikarenakan adanya efisiensi/sisa lelang dan secara garis besar kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya

1.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam pencapaian target yaitu terbatasnya sumber daya manusia.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0	0	23.100.000
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan	0	0	0	0
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	23.100.000

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2018, maka realisasi pendapatan yang dikelola OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 23.100.000,- atau 100%.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp 0,00 Realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pajak Daerah	0	0	0	0
b. Retribusi daerah	0	0	0	0
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0	0	0	0
d. Lain-Lain PAD yang sah	0	0	0	23.100.000
Jumlah	0	0	0	23.100.000

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar 0,00 % atau realisasi mencapai Rp 0,00

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pajak Hotel	0	0	0	0
Hotel Melati III	0	0	0	0
Hotel Melati II	0	0	0	0
Hotel Melati I	0	0	0	0
Losmen	0	0	0	0
b. Pajak Restoran	0	0	0	0
Restoran	0	0	0	0
Rumah Makan	0	0	0	0
c. Pajak Hiburan	0	0	0	0
Bioskop	0	0	0	0
Pagelaran Seni	0	0	0	0
Arena Bilyard	0	0	0	0
Hiburan Insedentil	0	0	0	0
Permainan Ketangkasan	0	0	0	0
Pertandingan	0	0	0	0
Kolam Renang	0	0	0	0
d. Pajak Reklame	0	0	0	0
Papan/Bilboard/Megatron	0	0	0	0
Kain	0	0	0	0
Melekat/Stiker	0	0	0	0
Reklame Selebaran	0	0	0	0
	0	0	0	0
e. Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0
f. Pajak Bahan Galian C	0	0	0	0
Batu Pecahan	0	0	0	0
Pasir	0	0	0	0
Batu Belah	0	0	0	0
g. Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0	0
h. Pajak Air Bawah Tanah	0	0	0	0
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp 0,00 atau 0,00 % dari target sebesar Rp 0,00 sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0
b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0	0
c. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK	0	0	0	0
d. Parkir di Tepi Jalan Umum	0	0	0	0
e. Pelayanan Pasar	0	0	0	0
f. Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
g. Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	0
h. Tempat Pelelangan	0	0	0	0
i. Terminal	0	0	0	0

j. Tempat Khusus Parkir	0	0	0	0
k. Tempat Penginapan/Pesanggrahan	0	0	0	0
l. Rumah Potong Hewan	0	0	0	0
m. Pelayanan Kepelabuhan	0	0	0	0
n. Tempat Rekreasi dan Olahraga	0	0	0	0
o. Penjualan Prod Usaha Daerah	0	0	0	0
p. Penutupan Jalan	0	0	0	0
q. Ijin Mendirikan Bangunan	0	0	0	0
r. Ijin Gangguan /Keramaian	0	0	0	0
s. Ijin Trayek	0	0	0	0
t. Ijin Jasa Konstruksi	0	0	0	0
u. Ijin penebangan pohon jati	0	0	0	0
v. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	0	0	0	0
w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	0	0	0	0
x. Tanda Daftar Industri (TDI)	0	0	0	0
y. Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan	0	0	0	0
z. Ijin Pengangkutan hasil Hutan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp 0,00 dari yang direncanakan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	0	0	0	0
PD Air Minum (PDAM)	0	0	0	0
PD Perbengkelan	0	0	0	0
PD Percetakan	0	0	0	0
PD Farmasi	0	0	0	0
b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0
PT. Bank Jateng	0	0	0	0
PD Bank Puspakencana	0	0	0	0
BKK Banjarharjo	0	0	0	0
BKK Brebes	0	0	0	0
c. Bagian Laba Penyertaan Pihak Ketiga	0	0	0	0
Dana Bergulir-Usaha Koperasi	0	0	0	0
Dana Bergulir-Usaha Pertanian	0	0	0	0
Dana Bergulir-Usaha Peternakan	0	0	0	0
Dana Bergulir-Usaha Perikanan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp 0,00 dari yang direncanakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Hasil Penj Aset Yang Tdk Dipisahkan	0	0	0	0

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
Penjualan Drum Bekas	0	0	0	0
Penjualan Bongkaran Proyek	0	0	0	0
b. Jasa Giro Kas Daerah	0	0	0	0
c. Bunga Deposito	0	0	0	0
Deposito pada BPD Jateng	0	0	0	0
Deposito pada Bank Mandiri	0	0	0	0
Deposito pada BRI	0	0	0	0
Deposito pada Bank Bukopin	0	0	0	0
Deposito pada BPR/BKK	0	0	0	0
Deposito pada BTPN	0	0	0	0
Deposito pada Bank Muamalat	0	0	0	0
d. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah	0	0	0	0
e. Denda Keterlambatan Pel Pekerja	0	0	0	0
f. Penerimaan Lain-lain	0	0	0	23.100.000
g. Kompensasi Sumber Air Kaligiri	0	0	0	0
h. Penerimaan Pabrik Gula	0	0	0	0
i. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	23.100.000

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 11.325.033.879 dari anggaran Rp 12.268.922.000 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Belanja Operasi (BO)	11.138.541.000	10.236.471.857	91,90	9.901.486.075
b. Belanja Modal (BM)	1.130.381.000	1.088.562.022	96,30	2.867.686.550
c. Belanja Tak Terduga (BTT)	-	-	-	-
d. Belanja Transfer (BT)	-	-	-	-
Jumlah	12.268.922.000	11.325.033.879	92,31	12.769.172.625

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja modal. Dalam Tahun Anggaran 2019 OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp 10.236.471,857 dari anggaran sebesar Rp 11.138.541,000 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018

a. Belanja Pegawai	3.727.692.000	3.634.474.743	97,50	3.277.823.140
b. Belanja Barang dan Jasa	7.410.849.000	6.601.997.114	89,09	6.623.662.935
c. Belanja Bunga	-	-	-	-
d. Belanja Subsidi	-	-	-	-
e. Belanja Hibah	-	-	-	-
f. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
g. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Jumlah	11.138.541.000	10.236.471.857	91,90	9.901.486.075

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Gaji dan Tunjangan	2.628.482.000	2.563.020.743	97,51	2.393.453.140
b. Tambahan Penghasilan PNS	1.000.900.000	989.900.000	98,90	857.000.000
c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-
e. Biaya Pemungutan Retribusi	-	-	-	-
f. Honorarium PNS	-	-	-	-
g. Honorarium Non PNS	-	-	-	-
h. Uang Lembur	98.310.000	81.554.000	82,96	27.370.000
i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
j. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	-	-	-
k. Belanja BLUD	-	-	-	-
l. Belanja BOS	-	-	-	-
Jumlah	3.727.692.000	3.634.474.743	97,50	3.277.823.140

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.008.625.000	1.883.905.981	93,79	3.226.238.000
b. Belanja Bahan/Material	600.000	339.000	56,50	82.161
c. Belanja Jasa Kantor	2.159.715.000	1.988.163.658	92,06	1.659.828.113
d. Belanja Premi Asuransi	-	-	-	-
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	162.832.000	140.300.126	86,16	78.620.487
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.539.485.000	1.449.797.725	94,17	920.378.100
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000	10.750.000	51,19	12.250.000
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51.300.000	34.020.000	66,32	-
i. Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000	770.000	34,22	605.000
k. Belanja Makanan dan Minuman	124.810.000	102.913.000	82,46	69.023.000
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
m. Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	-
o. Belanja Perjalanan Dinas	1.065.332.000	744.851.348	69,92	543.528.797
p. Belanja Beasiswa Tugas Belajar	-	-	-	-
q. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	-
r. Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
s. Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-
t. Belanja Pemeliharaan	227.400.000	206.486.276	90,80	76.709.277
u. Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	-
v. Belanja Honorarium PNS	30.500.000	26.500.000	86,89	36.400.000
w. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.000.000	13.200.000	77,65	-
x. Belanja BLUD	-	-	-	-
y. Belanja Barang-Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
z. Belanja BOS	-	-	-	-
Jumlah	7.410.849.000	6.601.997.114	89,09	6.623.662.935

- c. Realisasi Belanja Hibah TA 2019 sebesar Rp 0,00 merupakan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta;

Barang Hibah	Jumlah	(Rp)	Penerima
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah			

- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 sebesar Rp 0,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2019 sebesar Rp 0,00 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp 0,00 dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp 0,00

B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 1.088.562.022 dari anggaran sebesar Rp 1.130.381.000 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. BM - Tanah	-	-	-	-
b. BM - Peralatan & Mesin	1.115.381.000	1.076.562.022	96,52	1.126.904.050
c. BM - Gedung & Bangunan	-	-	-	1.737.832.500
d. BM - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
e. BM - Aset Tetap Lainnya.	15.000.000	12.000.000	80,00	2.950.000
Jumlah	1.130.381.000	1.088.562.022	96,30	2.867.686.550

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00

Belanja Tidak Terduga :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00

Belanja Transfer :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Bagi Hasil - Pajak	-	-	-	-
b. Bagi Hasil – Retribusi	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2019 dan 2018.

Pendapatan-LO tahun 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah - LO	0	23.100.000	(23.100.000)	(100,00)
2. Pendapatan Transfer - LO	0	0	0	0
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	0	0	0	0
Jumlah	0	23.100.000	(23.100.000)	(100,00)

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
1. Pendapatan Asli Daerah-LO				
A. Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
B. Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0
C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0	0	0	0
D. Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0	23.100.000	(23.100.000)	(100,00)
<i>Jumlah</i>	<i>0</i>	<i>23.100.000</i>	<i>(23.100.000)</i>	<i>(100,00)</i>

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
2. Pendapatan Transfer - LO				
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO				
B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
C. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
D. Bantuan Keuangan - LO				
<i>Jumlah</i>				

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
A. Pendapatan Hibah - LO				
B. Dana Darurat - LO				
C. Pendapatan Lainnya - LO				
<i>Jumlah</i>				

A. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
A. Pendapatan Hibah - LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang				

Dst.....				
Jumlah				

B. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2019 sebesar NIHIL

C. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
C. Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan				
b. Dispensasi Kelebihan Muatan				
c. Bantuan dari Pihak ke-3				
d. Tera Ulang				
e. Ijin Usaha Perkebunan				
f. Ijin Usaha Perikanan				
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu				
h. Pendapatan Dana BOS				
Dst....				
Jumlah				

Penjelasan :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
BEBAN				
A. Beban Operasi	11.294.269.417	9.325.367.670	1.968.901.747	21,11
B. Beban Transfer	-	-	-	-
Jumlah	11.294.269.417	9.325.367.670	1.968.901.747	21,11

Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
A. BEBAN OPERASI				

					NIHIL				

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- Beban penyusutan aset tetap tahun 2019 adalah sebesar Rp 993.408.165 dengan rincian sebagai berikut :

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 947.501.968,00
b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 43.197.822,00
c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 308.375,00
d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 2.400.000,00

- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2019 sebesar Rp

5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar Rp 0,00 terdiri dari :

a. Penyisihan Piutang Pajak	Rp 0,00
b. Penyisihan Piutang Retribusi	Rp 0,00
c. Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	Rp 0,00
d. Penyisihan Piutang Transfer	Rp 0,00
e. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 0,00
f. Penyisihan Piutang BLUD	Rp 0,00
g. Penyisihan Bag. Lancar TP-TGR	Rp 0,00
h. Penyisihan Piutang Lain-lain	Rp 0,00

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	0	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	0	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	14.327.610	0	14.327.610	0
JUMLAH	14.327.610	0	14.327.610	0
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	0	0	0
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	0	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	0	0	0
JUMLAH	0	0	0	0
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	14.327.610	0	14.327.610	0

Penjelasan :

1. Pada tahun 2019 dilaksanakan penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap yang disebabkan adanya koreksi kapitalisasi dari jaringan ke gedung dan bangunan sebesar Rp 14.327.610,-

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar Rp 0,00 dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar Rp 0,00

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018.

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.238.575.520,86 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.315.809.585,87 dikurangi Defisit-LO TA 2019 sebesar (Rp 11.279.941.807,00) dan koreksi ekuitas TA 2019 sebesar (Rp 122.326.137,01) ditambah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp 11.325.033.879,00

Rincian Koreksi Ekuitas sebagai berikut :

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Nilai Kas	-	-
Koreksi Nilai Piutang	-	-
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	-	-
Koreksi Beban Dibayar di Muka	-	-
Koreksi investasi	-	-
Koreksi Nilai Tanah	-	-
Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin	-	950.000,00
Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	-	-
Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya	-	-
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	(122.326.137,00)	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya	(0,01)	-
Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Koreksi Utang Belanja	-	(3.442.142,00)
Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap	-	145.878.000,00
Koreksi Awal Aset Tetap	-	-
Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(6.669.256,87)
Koreksi Awal Aset Lain-lain	-	-
Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain	-	-

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya	-	-
Jumlah	(122.326.137,01)	136.716.601,13

(koreksi aset pada LPE hanya yang berkaitan dengan penurunan nilai aset tahun-tahun sebelumnya, sedangkan koreksi atas tahun ybs/th 2019 mempengaruhi Laporan-LO yaitu dicatat sebagai Pendapatan-LO/Beban)

Penjelasan :

1. Koreksi Nilai Persediaan, merupakan :
 - a.
 - b.
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap, merupakan :
 - a.
 - b.
3. Koreksi Nilai Kas, merupakan :
4. Koreksi Nilai Piutang, merupakan :
 - a.
 - b.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang, merupakan :
 - a.
 - b.
6. Koreksi Nilai Beban Dibayar di Muka, merupakan :
 - a.
 - b.
7. Koreksi Nilai Investasi, merupakan :
 - a.
 - b.
8. Koreksi Nilai Tanah, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian tanah Rp
 - b.
9. Koreksi Nilai Peralatan Mesin, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian tanah Rp
 - b.
10. Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian gedung dan bangunan Rp
 - b.
11. Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian jalan irigasi dan jaringan Rp
 - b.
12. Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian Aset Tetap Lainnya Rp
 - b.

13. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
 - a. Koreksi tambah akumul. penyusutan alat-alat bantu (Rp 1.909.225,00)
 - b. Koreksi tambah akumul. penyusutan alat pengolahan (Rp 1.075.000,00)
 - c. Koreksi tambah akumul. penyusutan alat kantor (Rp 53.811.501,00)
 - d. Koreksi tambah akumul. penyusutan alat rumah tangga (Rp 8.243.426,00)
 - e. Koreksi tambah akumul. penyusutan komputer (Rp 110.657.456,00)
 - f. Koreksi tambah akumul. penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat (Rp 5.482.455,00)
 - g. Koreksi kurang akumul. penyusutan alat angkutan darat bermotor Rp 45.116.903,00
 - h. Koreksi kurang akumul. penyusutan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan Rp 1.075.000,00
 - i. Koreksi kurang akumul. penyusutan bangunan gedung tempat kerja Rp 12.611.856,00
 - g. Koreksi kurang akumul. penyusutan barang bercorak kebudayaan Rp 49.167,00
14. Koreksi Nilai Aset Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi atas nilai akumulasi aset lainnya tahun 2018 sebesar Rp (0,01)
 - b.
15. Koreksi Nilai Pendapatan di Muka, merupakan :
 - a.
 - b.
16. Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya, merupakan :
 - a.
 - b.
17. Koreksi Nilai Utang Belanja, merupakan :
 - a.
 - b.
18. Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap, merupakan :
 - a.
 - b.
19. Koreksi Awal Aset Tetap, merupakan :
 - a.
 - b.
20. Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
 - a.
 - b.
20. Koreksi Awal Aset Lain-lain, merupakan :
 - a.
 - b.
21. Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain, merupakan :
 - a.
 - b.
22. Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya, merupakan :

- a.
- b.

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Aset Lancar	2.894.010.196,00	2.960.030.904,00
Aset Tetap	4.292.619.320,00	4.307.466.643,00
Aset Lainnya	125.374.192,86	125.374.192,87
Jumlah Aset	7.312.003.708,86	7.392.871.739,87
Kewajiban	73.428.188,00	77.871.501,00
Ekuitas	7.238.575.520,86	7.315.000.238,87
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	7.312.003.708,86	7.392.871.739,87

A. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Kas	-	-
Piutang	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-
Persediaan	2.894.010.196	2.960.030.904
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.894.010.196	2.960.030.904

1. Kas

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Th. 2019	Th. 2018

Kas	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas BLUD	-	-
Kas di JKN	-	-
Kas di Bendahara FKTP	-	-
Kas di Bendahara BOS	-	-
Kas Lainnya (Kas BOS)	-	-
Jumlah	-	-

Saldo Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0,00 dan 0,00 Saldo Kas tahun 2019 sebesar Rp 0,00 terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 0,00 Kas tersebut merupakan :
 - a. ...
 - b. ...
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp 0,00 Kas tersebut merupakan :
 - a. ...
 - b. ...
3. Kas BLUD Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD, sebesar Rp 0,00

Rinci Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut :

- BLUD Puskesmas	:	Rp 0,00
- BLUD Puskesmas	:	Rp 0,00
- BLUD Puskesmas	:	Rp 0,00
- BLUD Puskesmas	:	Rp 0,00
- BLUD Puskesmas	:	Rp 0,00
Jumlah	:	Rp 0,00

4. Kas Lainnya, merupakan Kas BOS sebesar Rp 0,00 merupakan Dana BOS yang berada pada masing-masing sekolah di lingkungan Kabupaten Brebes. Dengan rincian sebagai berikut :

- SD	:	Rp 0,00 pada	SD Negeri
- SMP	:	Rp 0,00 pada	SMP Negeri

2. Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2019 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar TP-TGR, Piutang BLUD, Piutang Lain-lain

sebesar Rp 0,00

Jenis Piutang	Nilai Piutang
Piutang Pendapatan	
1) Piutang Pajak Daerah	-
2) Piutang Retribusi	-
3) Piutang Pendapatan non Pajak/Non Retribusi	-
4) Piutang BLUD	-
Piutang Lainnya	
1) Bag. Lancar TP-TGR	-
2) Piutang Ex-Dana Bergulir	-
Jumlah	-

PIUTANG PENDAPATAN

1) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 adalah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah :	2019	2018
	Rp	Rp
Piutang Pajak	0	0
Piutang Pajak	0	0
Jumlah	0	0

Mutasi Piutang Pajak sebagai berikut :

Saldo Piutang Pajak Tahun 2019 Rp 0,00

Penambahan :

a. Piutang atas transaksi tahun 2019 Rp 0,00

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp 0,00

c. dst Rp 0,00

Pengurangan :

a. Setoran tahun 2019	Rp 0,00
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp 0,00
c. dst	Rp 0,00
Saldo Piutang Pajak Tahun 2019	Rp 0,00

2) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	2019	2018
	Rp	Rp
Piutang Retribusi	0	0
Piutang Retribusi	0	0
Jumlah	0	0

Mutasi Piutang Retribusi sebagai berikut :

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019 Rp 0,00

Penambahan :

a. Piutang baru atas transaksi tahun 2019	Rp 0,00
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp 0,00
c. dst	Rp 0,00

Pengurangan :

a. Setoran pada tahun 2019	Rp 0,00
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp 0,00
c. dst	Rp 0,00
Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019	Rp 0,00

3) Piutang Pendapatan Non Pajak dan Non Retribusi

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima. Saldo piutang

dimaksud adalah Rp 0,00 Rincian Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

No	Piutang Lain-Lain :	Piutang Kepada	2019	2018
			Rp	Rp
1.	Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak	-	0	0
2.	Piutang Kelebihan Pembayaran	-	0	0
3.	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	0	0
4.	Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan	-	0	0
	Dst	-	0	0
	Jumlah	-	0	0

Penjelasan :

1. Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak merupakan Piutang Jaminan atas pekerjaan oleh
(nama rekanan)
2. Piutang Kelebihan Pembayaran merupakan piutang atas kelebihan pembayaran kepada (nama pihak ke-3)
3. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan merupakan piutang atas denda keterlambatan pekerjaan Daftar Piutang Keterlambatan Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.		-	0
2.		-	0
3.		-	0
	Jumlah	-	0

4. Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan merupakan piutang atas denda keterlambatan pelaporan (nama laporan) yang harus diterima dari (nama pihak yang wajib melaporkan)

No	Uraian	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.		-	0
2.		-	0
3.		-	0
	Jumlah	-	0

5) Piutang BLUD

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari aktivitas Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima. Saldo piutang dimaksud per tanggal tersebut adalah Rp 0,00 Rincian Piutang BLUD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Piutang BLUD :	2019	2018
	Rp	Rp
1. Piutang	0	0
2. Piutang	0	0
3. Piutang	0	0
Jumlah	0	0

3) Bagian Lancar TP-TGR

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Bagian Lancar dari Putang TP-TGR yang akan diterima pada tahun anggaran berikutnya. Piutang ini merupakan Piutang TP-TGR yang telah ditetapkan SK Pembebanannya oleh Majelis TP-TGR.

Saldo piutang dimaksud adalah Rp 0,00 Rincian Bagian Lancar TP-TGR adalah sebagai berikut :

Nama	Saldo 2018	Mutasi 2019		Saldo 2019
	Rp	Tambah	Kurang	Rp
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Mutasi Piutang TP-TGR sebagai berikut :

Saldo Piutang TP-TGR Tahun 2018 Rp 0,00

Penambahan :

a. Piutang baru penetapan th 2019 Rp 0,00

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp 0,00

c. dst Rp 0,00

Pengurangan :

a. Setoran tahun 2019 Rp 0,00

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp 0,00

c. dst Rp 0,00

Saldo Piutang TP-TGR Tahun 2019 Rp 0,00

5) Piutang Ex-Dana Bergulir

Saldo Piutang Ex-Dana Bergulir Tahun 2018 Rp 0,00

Penambahan :

a. Piutang baru penetapan th 2019 Rp 0,00

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp 0,00

c. dst Rp 0,00

Pengurangan :

a. Setoran tahun 2019 Rp 0,00

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp 0,00

c. dst Rp 0,00

Saldo Piutang Ex-Dana Bergulir Tahun 2019 Rp 0,00

6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan umur piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2019 sebesar **minus** Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Piutang	Nilai Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang
Piutang Pendapatan		
1) Piutang Pajak Daerah	0	0
2) Piutang Retribusi	0	0
3) Piutang Pendapatan non Pajak/Non Retribusi	0	0
4) Piutang BLUD	0	0
Piutang Lainnya		
1) Bag. Lancar TP-TGR	0	0
2) Piutang Ex-Dana Bergulir	0	0
Jumlah	0	0

Saldo masing-masing rekening Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
----------------------	---------------	--------------------

1. Piutang Pajak	0	0
2. Piutang Pajak	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Retribusi Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang Ret.	0	0
2. Piutang Ret.	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1.	0	0
2.	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Lainnya - Bagian Lancar TP-TGR	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang	0	0
2. Piutang	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Lainnya - Ex-Dana Bergulir	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang	0	0
2. Piutang	0	0
Jumlah	0	0

3. Persediaan

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah,

dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Persediaan :	2019	2018
	Rp	Rp
1. Bahan	-	-
2. Suku Cadang	-	-
3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.894.010.196	2.960.030.904
4. Obat-obatan	-	-
5. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6. Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	-	-
7. Natura dan Pakan	-	-
8. Persediaan Penelitian	-	-
9. Persediaan Dalam Proses	-	-
10. Persediaan Barang BOS	-	-
Jumlah	2.894.010.196	2.960.030.904

Mutasi persediaan selama tahun 2019 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Bahan	-	1.500.000	1.500.000	-
Suku Cadang	-	-	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.960.030.904	3.332.203.706	3.398.224.414	2.960.030.904
Obat-obatan	-	339.000	339.000	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	-	-	-	-
Natura dan Pakan	-	102.913.000	102.913.000	-
Persediaan Penelitian	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-
Persediaan Barang BOS	-	-	-	-
JUMLAH	2.960.030.904	3.436.955.706	3.502.976.414	2.960.030.904

Penjelasan penambahan persediaan selama th 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (+) SALDO AWAL	PENGADAAN TH 2019	REKLAS DARI PEMELIHARAAN	REKLAS DARI B. MODAL	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	HUTANG PERSEDIAAN	JUMLAH PENAMBAHAN
Bahan		1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000
Suku Cadang		-	-	-	-	-	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan		3.332.203.706	-	-	-	-	-	3.332.203.706

URAIAN REKONING BEBAN	KOREKSI (+) SALDO AWAL	PENGADAAN TH 2019	REKLAS DARI PEMELIHARAAN	REKLAS DARI B. MODAL	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	HUTANG PERSEDIAAN	JUMLAH PENAMBAHAN
Kantor								
Obat-obatan		339.000	-	-	-	-	-	339.000
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		-	-	-	-	-	-	-
Natura dan Pakan		102.913.000	-	-	-	-	-	102.913.000
Persediaan Penelitian		-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses		-	-	-	-	-	-	-
Persediaan Barang BOS		-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3.436.955.706	-	-	-	-	-	3.436.955.706

Penjelasan pengurangan persediaan selama th 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN REKONING BEBAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	PEMAKAIAN TH 2018	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUAR	REKLAS KE ASET TETAP	PINDAH KE KADALUARSARUSAK	JUMLAH PENGURANGAN
Bahan		1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
Suku Cadang		-	-	-	-	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		3.398.224.414	-	-	-	-	3.398.224.414
Obat-obatan		339.000	-	-	-	-	339.000
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		-	-	-	-	-	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		-	-	-	-	-	-
Natura dan Pakan		102.913.000	-	-	-	-	102.913.000
Persediaan Penelitian		-	-	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses		-	-	-	-	-	-
Persediaan Barang BOS		-	-	-	-	-	-

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	PEMAKAIAN TH 2018	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUAR	REKLAS KE ASET TETAP	PINDAH KE KADALUARSA/-RUSAK	JUMLAH PENGURANGAN
JUMLAH		3.502.976.414	-	-	-	-	3.502.976.414

Dari saldo tersebut tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Rekap barang Kadaluarsa dan Rusak sebagai berikut :

Barang Kadaluarsa/Usang

Persediaan :	Kadaluarsa	Usang
	Rp	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak	-	-
2. Obat-Obatan dan Alkes	-	-
3. Bibit Tanaman/Ternak	-	-
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga	-	-
5. Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Barang Rusak

Persediaan :	Saldo
	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak	-
2. Obat-Obatan dan Alkes	-
3. Bibit Tanaman/Ternak	-
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga	-
5. Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Dari saldo tersebut sebesar Rp 0,00 merupakan barang-barang yang direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat namun masih berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun rinciannya sebagaimana lampiran. *(buat lampiran yang diperlukan)*

B. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

1 . Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Brebes per 31 Desember 2019 dan 2018. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang di dalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 5.454.026.012,00 dan Rp 4.308.275.990,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap (kode 108)	2019	2018
	Rp	Rp
a. Tanah	23.328.900	23.328.900
b. Peralatan dan Mesin	6.556.529.883	5.407.829.861
c. Gedung dan Bangunan	2.523.084.900	2.477.419.500
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.335.000	58.000.400
e. Aset Tetap Lainnya	2.550.000	5.500.000
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	-	-
g. Akumulasi Penyusutan	(4.825.209.363)	(3.663.802.671)
Jumlah Aset Tetap	4.292.619.320	4.308.275.990

Pada tahun 2019 dilakukan penyesuaian saldo akhir tahun 2019 pada akun aset tetap yang sebelumnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan perubahan kodifikasi aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Adapun perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Perubahan kodifikasi mempengaruhi saldo akhir aset tetap tahun 2019 dengan perubahan sebagai berikut :

VERSI PERMENDAGRI 108		VERSI PERMENDAGRI 64	
URAIAN	NOMINAL	URAIAN	NOMINAL
Tanah	23.328.900	Tanah	23.328.900
Tanah	23.328.900	Tanah	23.328.900
Peralatan Dan Mesin	6.556.529.883	Peralatan & Mesin	6.541.579.883
Alat Besar	473.415.000	Alat - alat Berat	466.465.000
Alat Angkutan	1.541.857.500	Alat -alat Angkutan	1.541.857.500
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	Alat Bengkel	-
Alat Pertanian	1.075.000	Alat Pertanian & Peternakan	1.075.000
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.561.370.689	Alat -alat Kantor & RT	4.407.405.885
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	94.972.498	Alat Studio & Alat Komunikasi	94.972.498
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	2.450.000	Alat Ukur	-
Alat Laboratorium	-	Alat - alat Kedokteran	2.450.000

VERSI PERMENDAGRI 108		VERSI PERMENDAGRI 64	
Alat Persenjataan	-	Alat Laboratorium	-
Komputer	2.866.439.196	Alat Keamanan	27.354.000
Alat Eksplorasi	-		
Alat Pengeboran	-		
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-		
Alat Bantu Eksplorasi	-		
Alat Keselamatan Kerja	-		
Alat Peraga	-		
Peralatan Proses/Produksi	-		
Rambu – Rambu	-		
Peralatan Olah Raga	14.950.000		
Gedung Dan Bangunan	2.523.084.900	Gedung & Bangunan	2.523.084.900
Bangunan Gedung	2.523.084.900	Bangunan Gedung	2.523.084.900
Monumen	-	Bangunan Monumen	-
Bangunan Menara	-		
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-		
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	12.335.000	Jalan,Irigasi & Jaringan	12.335.000
Jalan Dan Jembatan	-	Jalan & jembatan	-
Bangunan Air	12.335.000	Bangunan Air (Irigasi)	12.335.000
Instalasi	-	Instalasi	-
Jaringan	-	Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	2.550.000	Aset Tetap Lainnya	17.500.000
Bahan Perpustakaan	2.550.000	Buku & Perpustakaan	2.550.000
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	14.950.000
Hewan	-	Hewan/Ternak & Tumbuhan	-
Biota Perairan	-		
Tanaman	-		
Barang Koleksi Non Budaya	-		
Aset Tetap Dalam Renovasi	-		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Jumlah	9.117.828.683	Jumlah	9.117.828.683

Mutasi aset tetap tahun 2019 sesuai klasifikasi Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN (RP)	PENGURANGAN (RP)	SALDO AKHIR
Tanah	23.328.900	-	-	23.328.900
Tanah	23.328.900	-	-	23.328.900
Peralatan Dan Mesin	5.407.829.861	1.136.562.022	2.812.000	6.541.579.883
Alat Besar	466.465.000		-	466.465.000
Alat Angkutan	1.122.357.500	419.500.000	-	1.541.857.500
Alat Bengkel	-	-	-	-
Alat Pertanian & Peternakan	1.075.000	-	-	1.075.000
Alat -alat Kantor & RT	3.741.189.863	669.028.022	2.812.000	4.407.405.885
Alat Studio & Alat Komunikasi	76.742.498	18.230.000	-	94.972.498

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN (RP)	PENGURANGAN (RP)	SALDO AKHIR
Alat Ukur	-	-	-	-
Alat - alat Kedokteran	-	2.450.000	-	2.450.000
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Keamanan	-	27.354.000	-	27.354.000
Gedung & Bangunan	2.477.419.500	45.665.400	-	2.523.084.900
Bangunan Gedung	2.477.419.500	45.665.400	-	2.523.084.900
Bangunan Monumen	-	-	-	-
Jalan,Irigasi & Jaringan	58.000.400	-	45.665.400	12.335.000
Jalan & jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air (Irigasi)	12.335.000	-	-	12.335.000
Instalasi	40.220.400	-	40.220.400	-
Jaringan	5.445.000	-	5.445.000	-
Aset Tetap Lainnya	5.500.000	12.000.000	-	17.500.000
Buku & Perpustakaan	2.550.000	-	-	2.550.000
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2.950.000	12.000.000	-	14.950.000
Hewan/Ternak & Tumbuhan	-	-	-	-
Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
JUMLAH	7.972.078.661	1.194.227.422	48.477.400	9.117.828.683

Penjelasan mutasi **penambahan** aset tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	-
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	1.076.562.022
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	-
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	12.000.000
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
	JUMLAH	1.088.562.022

b. Mutasi Masuk

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	-
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	60.000.000
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	-
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
	JUMLAH	60.000.000

c. Koreksi Tambah

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	-

01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	-
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	45.665.400
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
	JUMLAH	45.665.400

Penjelasan mutasi **pengurangan** aset tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Reklasifikasi ke Extracomtable

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	-
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	2.812.000
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	-
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
	JUMLAH	2.812.000

b. Koreksi Kurang

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	-
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	-
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	-
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	45.665.400
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
	JUMLAH	45.665.400

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP	Keterangan
1. Pekerjaan	-	-	-	-	-
2. Pekerjaan	-	-	-	-	-
3. Pekerjaan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Mutasi Aset Tetap terdiri dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan Aset Tetap atas barang pengadaan tahun 2019.

Penambahan Aset Tetap Tahun 2019 terdiri atas :

- Penambahan aset koreksi hasil sensus tahun 2019 Rp 0,00;
- Penambahan aset dari belanja modal tahun 2019 Rp 1.088.562.022,00;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja persediaan tahun 2019 Rp 0,00;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja pegawai tahun 2019 Rp 0,00;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja jasa tahun 2019 Rp 0,00;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja pemeliharaan tahun 2019 Rp 0,00;
- Reklasifikasi dari barang yang diserahkan kepada pihak ke-3 Rp 0,00;
- Penerimaan aset dari donasi/hibah dari pemerintah pusat Rp 0,00;
- Penerimaan aset dari donasi/hibah dari pemerintah provinsi Rp 0,00;
- Penerimaan aset dari mutasi masuk dari SKPD lain Rp 60.000.000,00 sebagai berikut :
 - Dari OPD Dinkominfo Rp 60.000.000,00
- Pengadaan aset tetap belum dibayar (hutang aset tetap) Rp 0,00,
- Reklasifikasi dari aset lainnya Rp 0,00;
- Penambahan aset dari KDP yang telah menjadi aset tetap Rp 0,00;
- Koreksi penambahan lainnya karena adanya perubahan kodefikasi yang sebelumnya berdasarkan pada Permendagri 64 menjadi Permendagri 108 Rp 45.665.400,00;

Pengurangan Aset Tetap Tahun 2019 terdiri atas:

- Pengurangan asset koreksi hasil sensus Rp 0,00;
- Tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (ekstrakomptabel) Rp 2.812.000,00;
- Reklasifikasi ke Beban Persediaan Rp 0,00;
- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Rp 0,00;
- Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas Rp 0,00;
- Hibah keluar Rp 0,00;
- Mutasi ke SKPD lain/Unit Kerja Rp 0,00
- Reklasifikasi KDP yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset Rp 0,00;
- Koreksi kurang karena adanya perubahan kodefikasi yang sebelumnya berdasarkan pada Permendagri 64 menjadi Permendagri 108 Rp 45.665.400;
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya barang Rusak Berat (RB) Rp 0,00;
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya barang Tidak Ditemukan (TD) Rp 0,00;
- Penghapusan barang Baik/Rusak Ringan Rp 0,00;
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud Rp 0,00;

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(219.275.775)	(63.722.797)	-	(282.998.572)
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(962.570.404)	(162.544.000)	(45.116.903)	(1.079.997.501)
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	-	(1.075.000)	-	(1.075.000)
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	(1.075.000)	-	(1.075.000)	-
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(505.188.899)	(195.055.901)	-	(700.244.800)
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(351.042.624)	(76.160.635)	-	(427.203.259)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.343.838.236)	(655.891.884)	-	(1.999.730.120)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(52.884.405)	(20.388.315)	-	(73.272.720)
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(55.179.500)	(10.004.499)	-	(65.183.999)
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(2.150.000)	(3.348.000)	-	(5.498.000)
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	-	(490.000)	-	(490.000)
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(154.370.801)	(43.197.822)	(12.611.856)	(184.956.767)
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	(1.850.250)	(308.375)	-	(2.158.625)
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(11.060.610)	-	(11.060.610)	-
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(3.267.000)	-	(3.267.000)	-
1.3.7.04.04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	(49.167)	(2.400.000)	(49.167)	(2.400.000)
		(3.663.802.671)	(1.234.587.228)	(73.180.536)	(4.825.209.363)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Penambahan Akumulasi Penyusutan

KODE REKENING	URAIAN	PENAMBAHAN				JUMLAH PENAMBAHAN
		BEBAN PENY.	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	KOREKSI +	
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(61.813.572,00)			(1.909.225,00)	(63.722.797,00)
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(102.544.000,00)	(60.000.000,00)	-	-	(162.544.000,00)
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	-	-	-	(1.075.000,00)	(1.075.000,00)
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	-	-	-
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(141.244.400,00)	-	-	(53.811.501,00)	(195.055.901,00)
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(67.917.209,00)	-	-	(8.243.426,00)	(76.160.635,00)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(545.234.428,00)	-	-	(110.657.456,00)	(655.891.884,00)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(14.905.860,00)	-	-	(5.482.455,00)	(20.388.315,00)
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(10.004.499,00)	-	-	-	(10.004.499,00)
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(3.348.000,00)	-	-	-	(3.348.000,00)
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(490.000,00)	-	-	-	(490.000,00)

1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(43.197.822,00)	-	-	-	(43.197.822,00)
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	(308.375,00)	-	-	-	(308.375,00)
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	-	-
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	-	-	-	-	-
1.3.7.04.04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	(2.400.000,00)	-	-	-	(2.400.000,00)
		(993.408.165,00)	(60.000.000,00)	-	(181.179.063,00)	(1.234.587.228,00)

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Pengurangan Akumulasi Penyusutan

KODE REKENING	URAIAN	PENGURANGAN			JUMLAH PENGURANGAN
		PENGHAPUSAN	MUTASI KELUAR	KOREKSI -	
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu				-
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	(45.116.903,00)	(45.116.903,00)
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan				
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	(1.075.000,00)	(1.075.000,00)
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	-	-	-	-
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	-	-	-	-
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	-	-	-	-
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	-	-	-	-
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	-	-	-	-
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran				
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	(12.611.856,00)	(12.611.856,00)
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	-	-
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(11.060.610,00)	-		(11.060.610,00)
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(3.267.000,00)	-	-	(3.267.000,00)
1.3.7.04.04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	(49.167,00)	(49.167,00)
		(14.327.610,00)	-	(58.852.926,00)	(73.180.536,00)

C. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 125.374.192,86 dan Rp 125.374.192,86 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2019
Tagihan Penjualan Angsuran	-	0	0	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	0	0	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	0	0	-
Aset Tak Berwujud	205.302.750,00	0	0	205.302.750,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(159.393.650,00)	0	0	(159.393.650,00)
Aset Lain-lain	1.042.794.100,00	0	0	1.042.794.100,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(963.329.007,13)	(0,01)	0	(963.329.007,14)
Jumlah	125.374.192,87	(0,01)	0,00	125.374.192,86

1. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp 205.302.750,- dan Rp 205.302.750,- Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp 205.302.750,- merupakan aset yang berupa software/ aplikasi komputer.

- Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
 - a. Pengadaan aplikasi Rp 0,00
 - b. Koreksi penambahan saldo tahun 2018 karenasebesar Rp 0,00
 - c. dst ...
- Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
 - a. Penghapusan software sebesar Rp 0,00
 - b. Koreksi pengurangan saldo tahun 2018 karenasebesar Rp 0,00
 - c. dst ...

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 159.393.650,- terdiri atas :

- Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2018 sebesar Rp 159.393.650
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2019 sebesar Rp
- Koreksi penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud saldo tahun 2018 sebesar (Rp 0,01)
- Koreksi pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud saldo tahun 2018 sebesar Rp 0,00
- Dst ...

3. Aset Lain-lain Rp1.042.794.100 terdiri atas :

- a. Aset tetap Rusak Berat (RB) yang telah tidak digunakan lagi untuk operasional SKPD sebesar Rp 963.549.100,00
- b. Aset tetap Tidak Ditemukan (TD) sebesar Rp 79.245.000,00
Atas barang-barang tersebut yang telah dihapusbukukan dan tidak tercatat pada KIB sebesar Rp 0,00, sedangkan yang belum dihapusbukukan dan masih tercatat pada KIB sebesar Rp 79.245.000,00

b. Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Tabel Detail Engineering (DE)

Uraian	Saldo 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

- Penambahan merupakan DE 2019 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya Rp 0,00
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan Rp 0,00
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang telah direklasifikasi ke aset tetap lainnya buku Rp 0,00
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang dihapuskan karena batal digunakan Rp 0,00
- c. Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Hibah Keluar Belum Dihapuskan

URAIAN	NOMINAL
Tanah	0,00

URAIAN	NOMINAL
Tanah	0,00
Peralatan Dan Mesin	0,00
Alat Besar	0,00
Alat Angkutan	0,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	0,00
Alat Pertanian	0,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	0,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	0,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0,00
Alat Laboratorium	0,00
Alat Persenjataan	0,00
Komputer	0,00
Alat Eksplorasi	0,00
Alat Pengeboran	0,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00
Alat Peraga	0,00
Peralatan Proses/Produksi	0,00
Rambu - Rambu	0,00
Peralatan Olah Raga	0,00
Gedung Dan Bangunan	0,00
Bangunan Gedung	0,00
Monumen	0,00
Bangunan Menara	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	0,00
Jalan Dan Jembatan	0,00
Bangunan Air	0,00
Instalasi	0,00
Jaringan	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00
Bahan Perpustakaan	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00
Hewan	0,00
Biota Perairan	0,00
Tanaman	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Jumlah	0,00

d. Barang berlebih yang belum dinilai berupasebesar Rp.....
(kalau ada, apabila lebih dari 1 jenis barang dapat dibuat table tersendiri)

e. dst

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Berat (RB), Tidak Ditemukan (TD) dan Hibah Keluar belum dihapuskan sebagai berikut :

Tabel Mutasi Ak. Penyusutan Barang Rusak Berat (RB)

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah					
Alat Besar					
Alat Angkutan					
Alat Bengkel					
Alat Pertanian & Peternakan					
Alat Kantor & Rumah Tangga					
Alat Studio & Komunikasi					
Alat Ukur					
Alat Kedokteran					
Alat Laboratorium					
Alat Keamanan					
Bangunan Gedung					
Bangunan Monumen					
Jalan & jembatan					
Bangunan Air (Irigasi)					
Instalasi					
Jaringan					
Buku & Perpustakaan					
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
Hewan/Ternak & Tumbuhan					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah					

Tabel Mutasi Ak. Penyusutan Barang Tidak Ditemukan (TD)

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah					
Alat Besar					
Alat Angkutan					
Alat Bengkel					
Alat Pertanian & Peternakan					
Alat Kantor & Rumah Tangga					
Alat Studio & Komunikasi					
Alat Ukur					

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Alat Kedokteran					
Alat Laboratorium					
Alat Keamanan					
Bangunan Gedung					
Bangunan Monumen					
Jalan & jembatan					
Bangunan Air (Irigasi)					
Instalasi					
Jaringan					
Buku & Perpustakaan					
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
Hewan/Ternak & Tumbuhan					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah					

Tabel Mutasi Barang Hibah Keluar Belum Dihapus

URAIAN	SALDO TH 2018	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah				
Alat Besar				
Alat Angkutan				
Alat Bengkel				
Alat Pertanian & Peternakan				
Alat Kantor & Rumah Tangga				
Alat Studio & Komunikasi				
Alat Ukur				
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Bangunan Gedung				
Bangunan Monumen				
Jalan & jembatan				
Bangunan Air (Irigasi)				
Instalasi				
Jaringan				
Buku & Perpustakaan				
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				
Hewan/Ternak & Tumbuhan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah				

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dengan saldo masing-masing sebesar Rp 73.428.180,- dan Rp 77.871.501,- dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Th. 2019	Th. 2018
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Uang Muka dari Kas Daerah	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	73.428.188	77.871.501
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
RK-PPKD	-	-
Jumlah	73.428.188	77.871.501

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 Rp 0,00, merupakan :

1. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, berupa Pajak sebesar Rp 0,00 Pajak sebesar Rp 0,00 dst...
2. Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 dan kas nya masih berada di rekening Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0,00
3. Dst (d disesuaikan dengan kondisi SKPD)

Adapun mutasi Utang PFK tahun 2019 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO TH 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO TH 2019	KETERANGAN
Utang PPh 21	-	-	-	-	
Utang PPN	-	-	-	-	
Utang PPh 22	-	-	-	-	
Utang PPh 23	-	-	-	-	
Utang Titipan Kas Pihak ke-3	-	-	-	-	
Utang	-	-	-	-	
..... (dst)	-	-	-	-	
JUMLAH	-	-	-	-	

2) *Utang Bunga*

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 NIHIL.

3) *Pendapatan Diterima Dimuka*

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2018 Rp 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka :	2018	2017
	Rp	Rp
a.	-	-
b.	-	-
Jumlah	-	-

4) *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 NIHIL.

5) *Utang Belanja*

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2019 sebesar Rp 73.428.180,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	SALDO 2018	TAMBAH	KURANG	SALDO 2019
Belanja Pegawai	67.100.000	61.104.338	67.100.000	61.104.330
Belanja Barang/Persediaan	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
Belanja Jasa	10.771.501	12.323.850	10.771.501	12.323.850
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
Jumlah	77.871.501	73.428.188	77.871.501	73.428.180

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :
 - a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - Utang TPP sebesar Rp 57.056.250,00

- Utang Kekurangan Gaji PNS sebesar Rp 4.048.088,00
 - b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan :
 - Utang atas pengadaan sebesar Rp 0,00
 - Utang atas pengadaan sebesar Rp 0,00
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan :
 - Utang atas Pemeliharaan sebesar Rp 0,00
 - Utang atas Pemeliharaan sebesar Rp 0,00
 - d. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - Utang atas belanja Listrik sebesar Rp 11.651.456,00
 - Utang atas belanja Telepon sebesar Rp 90.994,00
 - Utang atas belanja Air sebesar Rp 581.400,00
 - e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 0,00
2. Pengurangan :
- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp 67.100.000,-
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp 0,00
 - b. Utang Belanja Barang merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp 0,00
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp 0,00
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp 0,00
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp 0,00
 - d. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp 10.771.501,-
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp 0,00
 - e. Utang Belanja Perjalanan Dinas merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp 0,00
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp 0,00

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal TA 2019 yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Utang jangka pendek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang sebesar Rp 0,00 merupakan
2. Utang sebesar Rp 0,00 merupakan
3. Utang Putus Kontrak atas pekerjaan fisik sebagai berikut :

Tabel Utang Aset Tetap Putus Kontrak

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nilai KDP	Kemajuan Keuangan (Rp)	Utang Aset Belum Dibayar
Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-

Penjelasan atas kemajuan fisik pekerjaan telah dijelaskan pada penjelasan Aset Tetap dhi. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyeter kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.....

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 8.399.982.212,86 dan Rp 7.315.809.585,87 Perubahan atas ekuitas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2019 :	NILAI (Rp)
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018	7.315.809.586
Surplus/(Defisit)-LO	(11.279.941.807)
Koreksi Ekuitas	(122.326.137,01)
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	11.325.033.879,00
Jumlah	7.238.575.520,86

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi kesalahan pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar (Rp 11.325.033.879,-) Sedangkan nilai surplus/(defisit)-LO sebesar (Rp 11.279.941.807,-) sehingga memiliki perbedaan sebesar (Rp 45.092.072,-) Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

Hubungan LRA-LO Tahun 2019

No	Uraian	Rp
A	Surplus/(Defisit) LRA	(11.325.033.879)
	Penambahan	
1	Realisasi Belanja Modal	1.088.562.022
2	Penyesuaian Utang Beban Pegawai th 2018 yang telah dibayar	67.100.000
3	Penyesuaian Utang Beban Jasa th 2018 yang telah dibayar	10.771.501
4	Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis Akhir th 2019	1.971.088.946
5	Saldo Persediaan Cetak/Penggandaan/Jilid Akhir th 2109	922.921.250
6	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.327.610
7		
8		
9		
10		
11		
	Dst	
B	Jumlah Penambahan	4.074.771.329
	Pengurangan	
1	Penggunaan/Pemakaian saldo Persediaan Bahan Pakai Habis Persediaan Awal (th 2018)	2.298.913.000
2	Penggunaan/Pemakaian saldo Persediaan Cetak dan Penggandaan Persediaan Awal (th 2018)	661.117.904
3	Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tetap	993.408.165
4	Pencatatan Utang Beban Pegawai th 2019 yang belum dibayar	61.104.338
5	Pencatatan Utang Beban Jasa th 2019 yang belum dibayar	12.323.850

No	Uraian	Rp
6	Reklasifikasi aset tetap ke Ekstrakomptable	2.812.000
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
C	Jumlah Pengurangan	4.029.679.257
D	Surplus/(Defisit) LO (A+B-C)	(11.279.941.807)

Adapun penjelasan dari masing-masing item perbedaan antara LRA dan LO sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

1. Realisasi Belanja Modal

Nilai realisasi belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp 1.088.562.022,- mengurangi surplus/(defisit) LRA, namun tidak mengurangi nilai surplus/(defisit) LO dikarenakan pada saat pengadaan aset dari belanja modal langsung menambah nilai aset tetap di neraca tanpa menambah beban di LO.

2. Penyesuaian Utang Beban Pegawai

Utang beban pegawai pada tahun 2018 yang telah dibayar pada tahun 2019 adalah Rp 67.100.000,00

3. Penyesuaian Utang Beban Jasa

Utang beban jasa pada tahun 2018 yang telah dibayar pada tahun 2019 adalah Rp 10.771.501,00

4. Persediaan Bahan Pakai Habis

Saldo persediaan bahan pakai habis pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.971.088.946,00

5. Persediaan Cetak/Penggandaan/Jilid

Saldo cetak/penggandaan/jilid pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp 922.921.250,00

6. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2019 berasal dari penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap akibat koreksi kapitalisasi dari jaringan ke gedung dan bangunan sebesar Rp 14.327.610,00

Pengurangan :

1. Penggunaan/Pemakaian saldo Persediaan Bahan Pakai Habis
Penggunaan/pemakaian saldo persediaan bahan pakai habis persediaan awal (th 2018) adalah sebesar Rp 2.298.913.000,00

2. Penggunaan/Pemakaian saldo Persediaan Cetak dan Penggandaan
Penggunaan/pemakaian saldo persediaan cetak dan penggandaan awal (th 2018) adalah sebesar Rp 661.117.904,00

3. Beban Penyusutan Aset Tetap, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019.
Pos beban penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud dan penyisihan piutang menjadi salah satu pembeda antara belanja LRA dan beban LO.
Beban penyusutan/amortisasi dan penyisihan piutang merupakan bentuk implementasi basis akrual pada Pemerintah Daerah, dimana nilai beban tersebut menunjukkan tingkat penurunan potensi yang dimiliki oleh aset suatu entitas. Sedangkan pada LRA yang berbasis kas nilai beban dimaksud tidak menjadi pengurang surplus/(defisit) LRA.

4. Pencatatan Utang Beban Pegawai
Utang beban pegawai pada tahun 2019 yang belum dibayar adalah Rp 61.104.338,00

5. Pencatatan Utang Beban Pegawai
Utang beban jasa pada tahun 2019 yang belum dibayar adalah Rp 12.323.850,00

7. Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomptable
Reklasifikasi Papan Visual/Papan Nama (Nama ruangan /Jabatan /papan petunjuk lainnya) ke Barang Ekstrakomptable sebesar Rp 2.812.000,00

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2019 adalah sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

1. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA tahun 2019 adalah sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan piutang tahun 2019 Rp 0,00

Dst ...

Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya (Rp 0,00)

Dst ...

Jumlah Rp 0,00

Penambahan dan pengurangan piutang pajak tahun 2019 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	Pajak Hotel	0	0
2	Pajak Restoran	0	0
3	Pajak Hiburan	0	0
4	Pajak Reklame	0	0
5	PPJ PLN	0	0
6	Pajak Parkir	0	0
7	Pajak Air Tanah	0	0
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	0	0
9	Pajak Bumi dan Bangunan	0	0
JUMLAH		0	0

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan piutang tahun 2019 :

- Piutang	Rp 0,00
- Piutang	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp 0,00
- Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sblmnya	Rp 0,00
- Pengurangan atas pendapatan diterima dimuka	Rp 0,00
Dst	
Jumlah Pengurangan	Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00

Pengurangan atas pendapatan diterima di muka adalah pengurangan atas pendapatan yang telah disetorkan atas untuk jangka waktu tahun terhitung mulai sampai dengan

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih sebesar Rp 0,00 antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada LO dengan LRA merupakan pembayaran atas dan telah diakui sebagai pendapatan LO pada tahun

4. Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih sebesar Rp 0,00 antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

Penambahan atas piutang..... tahun 2019
dst Rp 0,00

Pengurangan :

Pengurangan atas pembayaran piutang (Rp 0,00)
Pengurangan atas piutang TGR (Rp 0,00)
Pengurangan atas denda kegiatan tahun (Rp 0,00)
dst

B. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA adalah sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO dengan pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

3. Dana Alokasi Umum

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Umum-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

4. Dana Alokasi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

5. Dana Otonomi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

6. Dana Penyesuaian

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

7. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

9. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut merupakan

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1. Pendapatan Hibah

Terdapat selisih antara pendapatan hibah-LO dengan pendapatan hibah-LRA Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

Dropping persediaan dari	Rp 0,00
Hibah aset tetap dari	Rp 0,00
Penambahan dari pihak ketiga	Rp 0,00
 Pengurangan	 (Rp 0,00)
 Jumlah	 Rp 0,00

2. Pendapatan Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan lainnya-LO dengan pendapatan lainnya-LRA Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0	0	0
0	0	0

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan	Rp 0,00
Pengurangan	(Rp 0,00)
Jumlah	Rp 0,00

D. SURPLUS NON OPERASIONAL

1. Surplus Penjualan Aset

Surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp 0,00 merupakan penjualan atas aset yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
		0
		0
	Jumlah	0

2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp 14.327.610,00 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
	Surplus Mutasi Persediaan antar SKPD-LO	14.327.610
		0
	Jumlah	14.327.610

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BELANJA OPERASI

1. Belanja Pegawai

Terdapat selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Rp 5.992.662,-

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
3.628.479.081	3.634.474.743	5.995.662

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Belanja Pegawai LRA	3.634.474.743
	Penambahan :	
	- Utang Beban Pegawai th 2019 yang belum dibayar	61.104.338
	Pengurangan :	
	- Utang TPP th 2018 yang dibayar pada th 2019	67.100.000
	Beban Pegawai LO	3.628.479.081

2. Belanja Barang dan Jasa

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp 67.573.057,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Persediaan	3.502.976.414	3.436.955.706	66.020.708
2	Beban/Belanja Jasa	2.074.956.007	2.073.403.658	1.552.349
3	Beban/Belanja Sewa			
4	Beban/Belanja Perjalanan Dinas	744.851.348	744.851.348	0
5	Beban/Belanja Pemeliharaan	346.786.402	346.786.402	0
6	Beban/Belanja Makanan dan Minuman			
7	Beban/Belanja Barang dan Jasa			
	Dst.			
	Jumlah	6.669.570.171	6.601.997.114	67.573.057

- 1) Selisih antara beban persediaan dengan belanja persediaan senilai Rp 66.020.708 terdiri atas :

Penambahan :

Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis Akhir th 2019 Rp 1.971.088.946,-
Saldo Persediaan Cetak/Penggandaan/Jilid Akhir th 2019 Rp 922.921.250,-

Pengurangan :

Penggunaan/Pemakaian Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis Persediaan Awal (th 2018) Rp 2.298.913.000,-
Penggunaan/Pemakaian Saldo Persediaan Cetak dan Penggandaan Persediaan Awal (th 2018) Rp 661.117.904,-
Jumlah Rp 66.020.708,-

- 2) Selisih antara beban jasa di LO dengan Belanja Jasa di LRA senilai Rp 1.552.349,- terdiri atas :

Penambahan :

- Beban yang masih belum terbayar sampai dengan akhir tahun Rp 12.323.850,-

Pengurangan

- Pembayaran utang jasa tahun sebelumnya (Rp 10.771.501)
Jumlah Rp 1.552.349,-

- 3) Selisih antara beban sewa-LO dengan belanja Sewa-LRA senilai Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

merupakan tambahan belanja Non APBD yaitu

- 4) Selisih antara beban perjalanan dinas di LO dengan belanja perjalanan dinas di LRA sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

merupakan

- 5) Selisih antara beban pemeliharaan di LO dengan belanja pemeliharaan di LRA senilai Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

terdiri atas :

Penambahan :

- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya Rp 0,00
- Dst

Pengurangan :

- Belanja Pemeliharaan yang di Kapitalisasi ke aset Tetap (Rp 0,00)
- Belanja pemeliharaan yang menambah saldo persediaan (Rp 0,00)
- Reklasifikasi ke Beban Jasa (Rp 0,00)
- Dst ...
- Jumlah Rp 0,00

- 6) Selisih antara beban makanan dan minuman di LO dengan belanja makanan dan minuman di LRA senilai Rp 0,00 terdiri dari :

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Penambahan :

- Beban yang belum terbayar sampai akhir tahun Rp 0,00
- Belanja Non APBD dari Rp 0,00
- Reklasifikasi dari beban barang dan jasa lainnya Rp 0,00
- Dst ...

Pengurangan :

- Pembayaran utang tahun sebelumnya Rp 0,00
- Dst ...
- Jumlah Rp 0,00

- 7) Selisih antara beban barang dan jasa lainnya di LO dengan belanja barang dan jasa lainnya di LRA senilai Rp 0,00 terdiri dari :

- Reklasifikasi dari ke Beban Rp 0,00
- Jumlah Rp 0,00

3. Belanja Hibah

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran memiliki perbedaan nilai dengan beban hibah pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Selisih tersebut merupakan

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 0,00 memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Selisih tersebut merupakan

5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 0,00 memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Selisih tersebut merupakan

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp 993.408.165,00

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp 0,00

8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp 2.812.000,00

9. Belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp 1.088.562.022, namun tidak dicatat pada Laporan Operasional.

10. Belanja Tak Terduga

3.2.2.2 TRANSFER

Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp 0,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

3.2.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

A. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR

Defisit ini merupakan defisit atas Penghapusan Aset Tetap yang hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp 0,00

B. DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni NIHIL

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1.1 UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, nama Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016.

Gambaran umum organisasi meliputi :

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi.
2. Sumber daya Kepegawaian dan Sarana Prasarana.

A.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Sehubungan dengan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

A.2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana Prasarana Dinas dan Sumber

Daya Manusia. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Tersedianya 3 gedung utama yang terdiri dari Gedung A, B, dan C. Gedung A digunakan sebagai gedung pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan sekretariat di lantai 2. Gedung B untuk menyimpan server database dan pelayanan perekaman KTP-el di Dinas. Adapun Gedung C digunakan untuk pelayanan legalisasi dokumen kependudukan dan ruang arsip
2. Adanya kendaraan dinas roda 4 operasional sejumlah : 7 unit roda 4 dan 1 unit mobil pelayanan keliling.
3. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, meja pelayanan pendaftaran, ruang tunggu yang ber-AC.
4. 2 unit server database kependudukan untuk pelayanan online KTP dan KK di kecamatan-kecamatan dan untuk monitoring data kependudukan.

Adapun potensi Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat dilihat dari aparatur yang ada di dalamnya. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes per 31 Desember 2019 terdiri dari :

Pendidikan	Golongan					Jumlah
	Honorar	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	0
Pendidikan SLTP	0	0	0	0	0	0
Pendidikan SLTA	0	0	5	2	0	7
Sarjana Muda / D III	0	0	0	1	0	1
Sarjana / S1 / D4	0	0	1	21	5	27
Program S2	0	0	0	1	1	2
Program S3	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	6	25	6	37

Sedangkan berdasar eselon, adalah sebagai berikut :

Eselon	Jumlah
Eselon 1	-
Eselon 2	1
Eselon 3a	1
Eselon 3b	4
Eselon 4	9
Jumlah	15

Sumber daya PNS tersebut, untuk menunjang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki tenaga harian lepas sejumlah 90 orang, yang sebagian besar berijazah sarjana dan bertugas sebagai operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan di 17 kecamatan. Kondisi tersebut masih dirasa kurang mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melakukan pelayanan terhadap kurang lebih 2 juta penduduk, sehingga ini adalah suatu permasalahan tersendiri yang dihadapi Dinas.

4.1.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, membawahi :

1. Sekretaris
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Keuangan
 - c. Kasubag Perencanaan
2. Kabid PIAK
 - a. Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - b. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
3. Kabid Pelayanan Capil
 - a. Kasi Kelahiran dan Kematian.
 - b. Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
4. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - a. Kasi Identitas Penduduk.
 - b. Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
5. Kabid PDIP
 - a. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - b. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

4.1.3 VISI DAN MISI OPD

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertuang dalam Renstra Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

Visi :
“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Misi :
“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah”

4.1.4 PERSONALIA

OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes memiliki 127 personil, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan/Dinas/Kantor, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 4 orang Kepala Bagian/Bidang, 9 orang Kasubag/Kasi, 1 (satu) orang Pejabat Fungsional, 111 orang staf di mana 21 orang adalah PNS dan 90 orang adalah tenaga kontrak/honorar.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2019. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes**

Drs. MAYANG SRI HERBIMO

NIP. 19640703 198903 1 014